

## **Politik dan Pendidikan di Indonesia: Dinamika Regulasi dari Orde Lama hingga Era Reformasi**

M. Hidayat

Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [hidayat@gmail.com](mailto:hidayat@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas hubungan antara kebijakan pendidikan dan dinamika politik di Indonesia, khususnya pada era reformasi. Topik ini dipilih mengingat perubahan signifikan dalam kebijakan pendidikan setelah Orde Baru, yang dipengaruhi oleh reformasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh politik dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kualitas pendidikan nasional. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, termasuk dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi upaya untuk mendemokratisasi pendidikan, pengaruh politik dalam kebijakan pendidikan masih tetap kuat. Temuan ini penting dalam konteks mengoptimalkan pendidikan yang bebas dari intervensi politik dan lebih fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hubungan antara pendidikan dan politik di Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika Politik Sistem Pendidikan Indonesia; Kebijakan Pendidikan; Pendidikan Demokratis; Reformasi Pendidikan.

### **Abstract**

This study explores the relationship between education policy and political dynamics in Indonesia during the reform era. The significance of this research lies in understanding how political shifts, particularly post-New Order, have shaped the educational landscape, with a focus on democratizing education and enhancing its quality. Through a qualitative descriptive approach, the study employs literature review methodology, analyzing official documents, academic journals, and relevant regulations. The findings reveal that political reforms have led to significant changes in education policy, fostering a more democratic and participatory approach. These shifts are critical in transforming Indonesia's educational system to align with global standards while maintaining national identity. This research contributes to the understanding of the intersection between politics and education, highlighting the need for continuous reform to improve the quality of education in Indonesia.

Keywords: Democratic Education; Education Policy; Educational Reform; Indonesia's Education System Political Dynamics.

How to Cite: Hidayat, M. (2025). Politik dan Pendidikan di Indonesia: Dinamika Regulasi dari Orde Lama hingga Era Reformasi. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(1), 40-54.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

## Pendahuluan

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi dalam perkembangan negara (Menter et al., 2017). Di Indonesia, dinamika regulasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik yang terjadi sepanjang sejarah, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi. Setiap perubahan politik membawa dampak besar terhadap kebijakan pendidikan, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas dan arah pendidikan di Indonesia (Winarno, 2007). Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya sebagai instrumen untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa dan mencapai tujuan nasional (Reimers & Chung, 2019).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan dinamika politik dari Orde Lama hingga Era Reformasi. Setiap perubahan rezim politik menghadirkan tantangan baru bagi sistem pendidikan, mulai dari kebijakan pendidikan yang terpusat pada masa Orde Baru hingga upaya desentralisasi pendidikan pada Era Reformasi. Gejala ini mencerminkan hubungan yang kompleks antara kebijakan politik dan pendidikan, yang sering kali berfokus pada kepentingan politik penguasa, tetapi pada saat yang sama juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menciptakan generasi yang kompeten dan berkarakter.

Beberapa teori dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pendidikan dan politik dalam konteks Indonesia. Teori sistem politik yang dikemukakan oleh Easton, (2017) memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh sistem politik yang ada, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam mencapai tujuan nasional. Selain itu, teori biopower yang dikembangkan oleh Foucault, (1977) dapat menjelaskan bagaimana negara menggunakan pendidikan untuk mengendalikan dan membentuk kehidupan sosial warganya, melalui pengaturan yang sistematis terhadap institusi pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai alat politik untuk mencapai tujuan negara (Evans, 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara pendidikan dan politik di Indonesia, baik dalam konteks perubahan kurikulum, kebijakan pendidikan, maupun dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Yasin et al., (2024) menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan masyarakat, sementara Bashori, (2018) berpendapat bahwa pendidikan dan politik tidak dapat dipisahkan, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Penelitian oleh Ananda & Hudaidah, (2021) mengkaji

perkembangan kurikulum di Indonesia sejak Orde Lama hingga Era Reformasi, dan Loppies, (2023) memberikan kritik terhadap otoritarianisme dalam kebijakan pendidikan Orde Baru. Penelitian Aftariansyah et al., (2025) juga menganalisis dampak kolonialisme terhadap pendidikan Indonesia yang masih terasa dalam kebijakan pendidikan pasca-kemerdekaan. Selain itu, Muid et al., (2025) menyoroti hubungan saling memengaruhi antara politik dan pendidikan dalam konteks global yang relevan dengan Indonesia, di mana kebijakan pendidikan sering mencerminkan agenda politik penguasa.

Beberapa studi lainnya juga memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika ini. Muhajirin et al., (2024) mengkritik kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru yang menekankan kontrol negara, sementara Mubarok et al., (2023) mengungkap dampak kebijakan sentralisasi pada pendidikan. Penelitian oleh Handoyo & Rokhman, (2025) mengeksplorasi perubahan struktur pendidikan dalam Era Reformasi dan pengaruh desentralisasi terhadap kualitas pendidikan lokal. Agung et al., (2023) meneliti dampak kurikulum berbasis kompetensi pada pendidikan, sedangkan Putri, (2025) menganalisis transformasi kebijakan pendidikan di Era Reformasi yang lebih menekankan pada demokratisasi pendidikan. Selain itu, penelitian Rozak & Az-Ziyadah, (2021) dan Khamim et al., (2024) juga menunjukkan bagaimana perubahan politik dan kebijakan pendidikan berbasis daerah berinteraksi, memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan pendidikan di Indonesia dalam konteks politik yang terus berubah.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dinamika regulasi pendidikan yang terkait dengan perubahan politik di Indonesia belum banyak dibahas secara komprehensif. Setiap era pemerintahan membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan, mulai dari Orde Lama yang lebih terpusat, Orde Baru yang mengedepankan otoritarianisme, hingga Era Reformasi yang menekankan desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana setiap perubahan politik tersebut memengaruhi kebijakan pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia, serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan pendidikan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika regulasi pendidikan di Indonesia dari Orde Lama hingga Era Reformasi, dengan fokus pada perubahan kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan politik di masing-masing era. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana setiap rezim politik telah membentuk sistem pendidikan di Indonesia, serta dampaknya terhadap

kualitas pendidikan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, demokratis, dan berkelanjutan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di era globalisasi dan memperkuat karakter bangsa.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan dinamika politik pada era reformasi di Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Purwanza, (2022) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami variabel secara mendalam tanpa melakukan perbandingan antar variabel. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Pahleviannur et al., (2022), yang menekankan bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik dan bersumber dari fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup berbagai sumber seperti dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan politik. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana reformasi politik pasca-Orde Baru berkontribusi dalam pembentukan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang cerdas dan berdaya.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Politik dan Pendidikan dalam Perspektif Umum**

Pendidikan dan politik merupakan dua elemen yang saling terkait erat dalam membentuk struktur sosial dan kebudayaan suatu negara. Sebagai sistem yang mengatur kehidupan bersama, politik memengaruhi kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh negara, sementara pendidikan berfungsi untuk membentuk pola pikir, karakter, dan sikap kritis individu yang kemudian berperan dalam kehidupan politik. Menurut Affandy et al., (2019) pendidikan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar transfer pengetahuan, yakni sebagai proses pembentukan karakter dan kemampuan kritis peserta didik. Pendidikan diharapkan mampu membekali individu dengan pengetahuan serta keterampilan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Dalam banyak teori pendidikan, hubungan antara politik dan pendidikan sering kali dilihat melalui dua perspektif yakni (1) sebagai alat politik untuk memperkuat

ideologi negara, dan(2)sebagai agen perubahan sosial yang dapat mengkritisi dan menggugat kebijakan yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Easton, (2017) yang menyatakan bahwa politik suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti geografi atau ekonomi, tetapi juga oleh faktor internal, seperti kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan, menurut Easton, memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan nilai-nilai masyarakat yang kemudian berperan dalam kehidupan politik negara tersebut. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa sangat dipengaruhi oleh orientasi politik yang berlaku pada waktu itu, yang terlihat jelas pada masa Orde Baru, dimana kebijakan pendidikan lebih menekankan pada kepatuhan terhadap sistem yang ada, dengan sedikit ruang bagi kebebasan berpikir peserta didik (Hartono, 2016).

Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan Indonesia sangat terpusat pada pemerintah pusat, di mana seluruh aspek pendidikan, mulai dari kurikulum hingga pengelolaan sekolah, dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari penerapan kurikulum yang kaku dan menekankan pada kedisiplinan serta kepatuhan terhadap negara, dengan sedikit ruang untuk pengembangan berpikir kritis atau kebebasan berekspresi. Pendidikan, pada masa itu, lebih berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan status quo politik dan menjaga ketertiban sosial(Addina & Hanif, 2025; Azhari, 2025; Giroux, 2018; Jost et al., 2022; Kundu, 2025; Zohar & Cohen, 2016). Dalam pandangan Foucault, (1977)pendidikan pada masa ini bisa dipandang sebagai bagian dari "biopower", yakni bentuk kekuasaan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat secara luas untuk mempertahankan ideologi politik yang ada. Dengan demikian, pendidikan di masa Orde Baru tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter yang patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Namun, pasca-reformasi 1998, terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam hubungan antara politik dan pendidikan di Indonesia. Reformasi politik yang berlangsung sejak 1998 membuka peluang bagi perubahan kebijakan pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Seperti yang dijelaskan oleh Lambelanova & Jaelani, (2022), kebijakan pendidikan pasca-Orde Baru lebih mengarah pada desentralisasi dan pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola pendidikan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar bagi masyarakat dan sekolah untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, pendidikan di era reformasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencetak generasi yang terampil,

tetapi juga sebagai alat untuk mempersiapkan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik (Dewantara et al., 2019; Malik, 2018). Pendidikan yang demokratis, seperti yang tercermin dalam kebijakan "Kurikulum Berbasis Kompetensi" dan "Manajemen Berbasis Sekolah", membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam proses pendidikan (Hang, 2017; Martin, 2019). Sebagaimana diungkapkan oleh Foucault, (1977), pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengaturan perilaku sosial yang dapat memperkuat atau melemahkan sistem politik yang ada. Oleh karena itu, perubahan dalam kebijakan pendidikan di era reformasi ini membawa kebaruan yang penting, yakni transformasi dari pendidikan yang semula terpusat dan otoriter menjadi lebih terbuka dan berorientasi pada pluralisme dan partisipasi aktif masyarakat. Hubungan antara pendidikan dan politik ini adalah proses yang saling memengaruhi dan berkembang seiring waktu. Perubahan kebijakan pendidikan pasca-Orde Baru, yang semakin demokratis dan desentralistik, menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dinamika politik dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Peran pendidikan dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan kritis dalam kehidupan politik menjadi semakin penting. Oleh karena itu, pendidikan harus dilihat tidak hanya sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial, berpikir kritis, dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik (Cladis, 2020; Rieckmann, 2018).

### **Dinamika Regulasi Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan penting sejak kemerdekaan, yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial-ekonomi pada setiap periode. Setiap perubahan kebijakan pendidikan ini tidak hanya mencerminkan orientasi pemerintah pada saat itu, tetapi juga bagaimana pendidikan dipergunakan sebagai instrumen untuk menciptakan masyarakat yang sesuai dengan ideologi dan tujuan negara. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu refleksi dari perubahan sistem politik, yang mengarah pada pergeseran model pendidikan yang lebih terbuka, demokratis, dan berbasis pada kompetensi, seiring dengan perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara.

Pada masa Orde Lama (1945–1965), pendidikan di Indonesia dirancang untuk memperkuat identitas nasional dan rasa kebangsaan pasca-kemerdekaan. Pada tahun 1947, kurikulum pertama Indonesia, yakni Kurikulum 1947, disusun dengan tujuan menanamkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Kurikulum ini mengutamakan

pengajaran tentang sejarah perjuangan bangsa, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan keinginan untuk membangun negara yang baru merdeka. Pendidikan pada masa ini juga didorong oleh semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan dan untuk memperkuat fondasi negara Indonesia yang baru (Akhmadiyanto, 2024). Kebijakan pendidikan ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan generasi muda yang memiliki komitmen terhadap kemerdekaan dan pembangunan negara.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru (1966–1998), pendidikan mengalami perubahan signifikan, yang banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang otoriter. Pendidikan pada masa ini lebih berorientasi pada pembentukan masyarakat yang patuh terhadap pemerintah, dengan menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat ideologi negara. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan pada masa Orde Baru adalah wajib belajar enam tahun, yang menjadi landasan bagi pemerataan pendidikan dasar di seluruh Indonesia. Kurikulum pada masa ini juga mengalami pembaruan, dengan penekanan pada pendidikan moral dan nasionalisme yang digunakan untuk memperkuat kontrol politik negara (Hidayat et al., 2025). Selain itu, pada periode ini, sistem pendidikan di Indonesia lebih terpusat, dengan pemerintah pusat mengontrol secara ketat pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah. Namun, pada masa reformasi (1998–sekarang), terjadi perubahan besar dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Reformasi politik yang terjadi membawa dampak langsung pada sektor pendidikan, yang mulai mengarah pada sistem yang lebih terbuka dan demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan mulai diarahkan pada pembentukan individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan sosial, kritis, dan berakarakter. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan pada era ini adalah desentralisasi pendidikan, yang memberi lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk mengelola pendidikan secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan lokal (Mahdiyah et al., 2025). Perubahan ini tercermin dalam penerapan Kurikulum 2004 (KTSP) dan Kurikulum 2013 yang mengedepankan pendekatan berbasis kompetensi dan berbasis karakter.

Pada masa reformasi ini pula, anggaran pendidikan mulai mendapatkan perhatian serius, dengan pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, tetapi juga untuk memperkecil

kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal (Khan et al., 2019). Oleh karena itu, desentralisasi dan alokasi anggaran yang lebih besar ini bertujuan untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan, sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih merata di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perubahan kurikulum dan desentralisasi kebijakan pendidikan, penting juga untuk melihat peran Pancasila sebagai ideologi negara dalam pendidikan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang diajarkan di sekolah-sekolah diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang tidak hanya berkompeten dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki rasa nasionalisme, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Pancasila diharapkan menjadi landasan dalam membangun identitas nasional dan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air (Billah et al., 2023). Namun, pelaksanaan nilai-nilai ini seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat mengarah pada manipulasi pendidikan untuk tujuan tertentu.

Dengan melihat dinamika perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia, jelas bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan akademik, tetapi juga oleh pertimbangan politik dan sosial. Setiap perubahan dalam kebijakan pendidikan mencerminkan perubahan dalam sistem politik dan ideologi negara yang sedang berlangsung pada waktu tersebut. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang terpusat pada masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperkuat kontrol pemerintah, sementara kebijakan desentralisasi pada masa reformasi mencerminkan semangat untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan partisipasi kepada masyarakat dalam mengelola pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang ada pada setiap periode.

Menurut Sain et al., (2024) dan Sukmayadi & Yahya, (2020) memberikan wawasan penting mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia terus berkembang, mencerminkan interaksi antara kebijakan politik dan pendidikan. Pembaruan pendidikan pada masa reformasi, termasuk desentralisasi, peningkatan anggaran pendidikan, serta perubahan kurikulum, menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia bertransformasi sesuai dengan dinamika politik yang terjadi.

### **Refleksi Wacana Pemisahan Politik dan Pendidikan**

Hubungan antara politik dan pendidikan selalu menjadi topik yang kontroversial, terlebih dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi, pendidikan dilihat sebagai instrumen penting untuk membentuk karakter dan menciptakan generasi yang mampu mendukung pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, banyak pihak

yang menganggap bahwa politik seharusnya tidak terlibat dalam proses pendidikan, karena pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bebas dari pengaruh kepentingan politik tertentu. Pemisahan antara pendidikan dan politik ini menjadi isu yang berkembang dalam wacana pendidikan, terutama di negara-negara yang pernah mengalami otoritarianisme seperti Indonesia pada masa Orde Baru.

Sejak awal abad ke-20, sejumlah ahli pendidikan dan politik di dunia mulai membahas pentingnya memisahkan pendidikan dari pengaruh politik. Salah satu pandangan penting yang muncul adalah dari Fatkhuri, (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan seharusnya bebas dari tekanan politik yang dapat merusak kualitas dan otonomi sistem pendidikan. Eliot berpendapat bahwa penggunaan patronase dalam pengangkatan staf atau pengambilan keputusan dalam sistem pendidikan sering kali didorong oleh kepentingan politik, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas pendidikan yang terbaik. Pandangan ini menjadi salah satu dasar dari gerakan yang menginginkan pemisahan antara pendidikan dan politik, yang bertujuan untuk menjaga agar pendidikan tetap bersih dari pengaruh-pengaruh eksternal yang merugikan (Tompkins-Stange, 2020; Verger et al., 2016). Dalam konteks Indonesia, pemisahan politik dan pendidikan telah menjadi masalah yang sangat relevan, terutama setelah berakhirnya Orde Baru. Selama masa tersebut, pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah yang otoriter. Sebagai contoh, kurikulum pendidikan pada masa itu cenderung berorientasi pada pembentukan warga negara yang patuh terhadap negara dan pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan politik negara. Pendidikan moral dan kewarganegaraan yang diterapkan pada saat itu sering kali digunakan sebagai sarana untuk menguatkan ideologi politik tertentu, yang tidak jarang mengorbankan kebebasan berpikir siswa dan mendominasi pandangan politik mereka (Zhang & Fagan, 2016).

Setelah masa reformasi, kebijakan pendidikan Indonesia mulai berorientasi pada kebebasan dan demokratisasi, dengan salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi intervensi politik dalam sistem pendidikan. Meskipun demikian, di tingkat praktis, pemisahan politik dan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Birokrasi pendidikan yang kompleks sering kali menjadi tempat bagi para politisi untuk melakukan intervensi. Di beberapa daerah, pelaksanaan kebijakan pendidikan masih dipengaruhi oleh politik lokal, baik dalam hal pengangkatan pejabat pendidikan maupun alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk memisahkan politik dan pendidikan, kenyataannya tidak mudah untuk mewujudkan pemisahan tersebut secara sempurna (Vlieghe & Zamojski,

2020). Pancasila, sebagai ideologi negara, juga memainkan peran penting dalam wacana pemisahan antara pendidikan dan politik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang diajarkan di sekolah-sekolah tidak hanya berfungsi untuk membentuk karakter dan moral generasi muda, tetapi juga sering kali digunakan untuk memperkuat identitas nasional yang sesuai dengan ideologi negara. Sebagai contoh, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila tidak jarang digunakan untuk memperkuat loyalitas terhadap negara dan pemerintah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pendidikan dapat dianggap netral dan bebas dari pengaruh politik, khususnya ketika nilai-nilai ideologi negara menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan (Li, 2026; Vincent, 2023). Di sisi lain, meskipun ada argumen kuat yang mendukung pemisahan antara politik dan pendidikan, beberapa ahli berpendapat bahwa pendidikan dan politik sebenarnya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Easton, (2017) dalam teorinya mengenai sistem politik menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam membentuk struktur politik negara. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter politik warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun diinginkan untuk menjaga otonomi pendidikan, keberadaan politik dalam pendidikan tidak dapat dihindari sepenuhnya, karena pendidikan itu sendiri merupakan sarana untuk membentuk masyarakat yang berperan dalam sistem politik (Oshana, 2016).

Dengan demikian, wacana pemisahan politik dan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi pengaruh politik dalam pendidikan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan dan politik tetap saling berinteraksi dan tidak mudah untuk dipisahkan. Pendidikan di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan politik dan sosial-ekonomi, dan kebijakan pendidikan yang ada harus mampu merespon dinamika tersebut tanpa terjebak dalam kepentingan politik sempit yang justru dapat merugikan masa depan bangsa.

## **Kesimpulan**

Hubungan antara pendidikan dan politik di Indonesia sangat erat dan saling memengaruhi. Meskipun idealnya keduanya dipisahkan, pendidikan nasional nyatanya selalu terikat pada pengaruh politik, baik pada tingkat kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan. Sejarah menunjukkan peran ini, misalnya di masa Orde Baru, pendidikan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kekuasaan politik yang otoriter.

Sementara itu, di Era Reformasi, meskipun terdapat dorongan demokratisasi, intervensi politik dalam kebijakan pendidikan tetap berlangsung. Kenyataan ini tampak jelas dari banyaknya regulasi sistem pendidikan yang sering dibentuk berdasarkan dinamika dan kepentingan pemerintah. Dengan demikian, meskipun misi utama pendidikan adalah mencetak generasi yang cerdas dan mandiri, politik memiliki peran signifikan dalam menentukan arah dan pembentukan kebijakan nasional. Oleh karena itu, penting adanya upaya berkelanjutan guna mempertahankan kesetimbangan antara kebebasan pendidikan dan pengaruh politik, sehingga pendidikan dapat berfungsi maksimal dalam pengembangan karakter dan sumber daya manusia tanpa menjadi sasaran agenda politik yang terbatas.

### Daftar Pustaka

- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 196–210.
- Affandy, H., Aminah, N. S., & Supriyanto, A. (2019). The correlation of character education with critical thinking skills as an important attribute to success in the 21 st century. *Journal of Physics: Conference Series*, 1153, 012132. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1153/1/012132>
- Aftariansyah, M. D., Hanifa, S., & Aepudin, S. (2025). Pengaruh Doktrin Konstruktivisme Budaya Bangsa Belanda Sebagai Negara Kolonialisme Terhadap Tipologi Bangsa Indonesia Sebagai Negara Post-Kolonialisme. *Gunung Djati Conference Series*, 50, 109–123.
- Agung, L., Sitika, A. J., Lestari, J. R. D., Putri, K. V., Azahra, M., Ulviyah, N., & Sutejo, Y. (2023). Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 1–8.
- Akhmadiyanto, S. (2024). *Manajemen Pembelajaran Sejarah Indonesia: Membangun Wawasan Kebangsaan Dan Sikap Nasionalisme Siswa Pada Kurikulum Merdeka Di Man 1 Banyumas*. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia).
- Ananda, A. P., & Hudaidah, H. (2021). Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3(2), 102–108.

- Azhari, H. (2025). *STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN*. Feniks Muda Sejahtera.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310.
- Billah, H. U., Yunita, M. A., Pratama, M. A., & Kembara, M. D. (2023). Kesadaran berpancasila dalam mempertahankan identitas nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 113–121.
- Cladis, A. E. (2020). A shifting paradigm: An evaluation of the pervasive effects of digital technologies on language expression, creativity, critical thinking, political discourse, and interactive processes of human communications. *E-Learning and Digital Media*, 17(5), 341–364. <https://doi.org/10.1177/2042753017752583>
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as ideology and characteristics civic education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400–405.
- Easton, D. (2017). A systems analysis of political life. In *Systems research for behavioral science* (pp. 428–436). Routledge.
- Evans, M. (2017). *Policy transfer in global perspective*. Taylor & Francis.
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278–297.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books. <https://books.google.co.id/books?id=o9cPAQAAMAAJ>
- Giroux, H. A. (2018). When Schools Become Dead Zones of the Imagination. In *The Wiley Handbook of Global Educational Reform* (pp. 503–515). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119082316.ch24>
- Handoyo, E., & Rokhman, F. (2025). Reformasi Kurikulum Dalam Konteks Desentralisasi: Analisis Kritis Terhadap Tiga Studi Terkait. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 256–266.
- Hang, C. (2017). *Education management reform strategies for enhancing the quality citizenship in Cambodia*.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan kebijakan politik (Kajian reformasi pendidikan di indonesia masa orde lama hingga reformasi). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 35–45.
- Hidayat, M. T., Suryadi, S., Latifannisa, N., Sari, S. N., & Rino, R. (2025). Evolution of The Education Curriculum in Indonesia. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 6(2), 381–395.

- Jost, J. T., Baldassarri, D. S., & Druckman, J. N. (2022). Cognitive–motivational mechanisms of political polarization in social-communicative contexts. *Nature Reviews Psychology*, 1(10), 560–576. <https://doi.org/10.1038/s44159-022-00093-5>
- Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). Pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dinamika politik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2027–2042.
- Khan, S., Hwang, G., Azeem Abbas, M., & Rehman, A. (2019). Mitigating the urban–rural educational gap in developing countries through mobile technology-supported learning. *British Journal of Educational Technology*, 50(2), 735–749. <https://doi.org/10.1111/bjet.12692>
- Kundu, A. (2025). Moving Beyond “Management” of the Status-Quo: How Leading Scholars Expand Educational Leadership and Promote Equity Through Political Capital. *Educational Management Administration & Leadership*. <https://doi.org/10.1177/17411432251326401>
- Lambelanova, R., & Jaelani, R. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. IPDN JATINANGOR.
- Li, Y. (2026). Criticality and metacognition in citizenship education: ‘Hermeneutics of suspicion’ in Chinese elite universities graduates’ worldview-transforming processes. *Thinking Skills and Creativity*, 59, 101960. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2025.101960>
- Loppies, M. (2023). Pendidikan Zaman Orde Baru: Upaya Melanggengkan Kekuasaan Soeharto. *Phinisi Integration Review*, 6(2).
- Mahdiyah, D., Ba’in, B., & Soeharso, R. (2025). Kurikulum Dalam Bingkai Desentralisasi: Kajian Kebijakan Pendidikan Indonesia Masa Reformasi. *Jurnal Ilmiah Widya Pustaka Pendidikan*, 13(a), 64–75.
- Malik, R. S. (2018). Educational challenges in 21st century and sustainable development. *Journal of Sustainable Development Education and Research*, 2(1), 9–20.
- Martin, S. N. (2019). Science education in Indonesia: past, present, and future. *Asia-Pacific Science Education*, 5(1), 1–29.
- Menter, I., Valeeva, R., & Kalimullin, A. (2017). A tale of two countries – forty years on: politics and teacher education in Russia and England. *European Journal of Teacher Education*, 40(5), 616–629. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1385060>

- Mubarok, A. W., Sulistia, D. S., & Nurwahidah, I. (2023). Kebijakan Sentralisasi dan Manajemen Straregik dalam Pendidikan. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 188–195.
- Muhajirin, M., Su'adi, S., & El Widdah, M. (2024). Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3853–3864.
- Muid, A., Emiliyah, N. F., Izzah, N., & Aini, R. (2025). Peran Negara Dalam Kebijakan Pendidikan Politik Di Indonesia. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 15(15), 28–35.
- Oshana, M. (2016). *Personal autonomy in society*. Routledge.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisya, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Putri, D. Y. (2025). Transformasi Pendidikan Indonesia di Era Reformasi: Analisis Perubahan, Tantangan, dan Harapan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1473–1483.
- Reimers, F. M., & Chung, C. K. (2019). *Teaching and learning for the twenty-first century: Educational goals, policies, and curricula from six nations*. Harvard education press.
- Rieckmann, M. (2018). Learning to transform the world: Key competencies in Education for Sustainable Development. *Issues and Trends in Education for Sustainable Development*, 39(1), 39–59.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim| Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Sain, Z. H., Aziz, A. L., & Agoi, M. A. (2024). Navigating Educational Challenges in Indonesia: Policy Recommendations for Future Success. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, 3(4), 1038–1046.
- Sukmayadi, V., & Yahya, A. (2020). Indonesian education landscape and the 21st century challenges. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 219–234.
- Tompkins-Stange, M. E. (2020). *Policy patrons: Philanthropy, education reform, and the politics of influence*. Harvard Education Press.
- Verger, A., Fontdevila, C., & Zancajo, A. (2016). *The privatization of education: A political economy of global education reform*. Teachers College Press.

- Vincent, A. (2023). *Modern political ideologies*. John Wiley & Sons.
- Vlieghe, J., & Zamojski, P. (2020). Redefining education and politics: On the paradoxical relation between two separate spheres. *Policy Futures in Education*, 18(7), 864–877. <https://doi.org/10.1177/1478210320943808>
- Winarno, B. (2007). *Sistem politik Indonesia era reformasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yasin, M., Ikhsan, M., Hawa, E., & Nadila, A. D. (2024). Peran Guru Sebagai Agen Perubahan di Sekolah Dan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(3), 279–288.
- Zhang, C., & Fagan, C. (2016). Examining the role of ideological and political education on university students' civic perceptions and civic participation in Mainland China: Some hints from contemporary citizenship theory. *Citizenship, Social and Economics Education*, 15(2), 117–142. <https://doi.org/10.1177/2047173416681170>
- Zohar, A., & Cohen, A. (2016). Large scale implementation of higher order thinking (HOT) in civic education: The interplay of policy, politics, pedagogical leadership and detailed pedagogical planning. *Thinking Skills and Creativity*, 21, 85–96. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.05.003>